

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- A. A. Chomzah, *Hukum Pertanahan: Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Sertipikat dan Permasalahan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2002).
- Aarce Tehupeior, *Monograf Penegakan Hukum Terhadap Praktek Mafia Tanah*, (Jakarta: UKI Press, 2016).
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2013)
- Dr. Dianma R.W. Napitupulu, *Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah dan Peralihannya)*, (Jakarta: UKI Press, 2022).
- Dr. Gunanegara, *Mafia Tanah dan Primum Remedium*, (Jakarta: 2022).
- Dr. Isyanto, *Teori Hukum: Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, (Jakarta: WR Penerbit, 2016).
- Edison Gultom, *Revolusi Digital dalam Administrasi Pertanahan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2020)
- Eli Wuria Dewi, *Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah Dan Segala Perizinannya*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2014)
- H. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012).
- I Nyoman Putu Budiarta dan Dewa Gede Atmadja, *Teori-Teori Hukum*, (Denpasar: Setara Press, 2018).
- Isnaini dan Anggreni A. Lubis, *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*, (Medan: Pustaka Prima, 2022).
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2016).
- Moh Muhibbin dan Miftahul Amin, *Pemberantasan Mafia Tanah*, (Jakarta: Penerbit CV. Eureka Media Aksara, 2024).
- Napitupulu, D. R. W., *Pendaftaran Tanah (Pensertipikatan Hak Atas Tanah Dan Peralihannya)*, (Jakarta: Uki Press, 2022).
- Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Penerbit Qiara Media, 2021)
- Nursyahbani Katjasungkana Siahaan, *Pengelolaan Tanah dan Hak Atas Tanah: Tinjauan Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019)
- O. Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).
- Oksidelfa, Y., *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Rachmat Suhendar, *Hukum Pertanahan: Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pembangunan*, (Bandung: Mandar Maju, 2016)

- S. S. Nugroho, M. Tohari, dan M. Rahardjo, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Iltizam, 2017).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Sudikno Mertokusumo Tjandra, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2014)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2005).
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Yuliandi, *Strategi Pemberantasan Mafia Tanah*, (Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021).

Jurnal-Jurnal

- Adinugroho, K. Rheza Sandhy. "Tantangan Implementasi Sertipikat Tanah Elektronik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia." *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, Volume 4, no. 2, (2023): 1-15. DOI: <https://doi.org/10.19184/jik.v4i2.41314>
- Alimuddin, N. Handayani. "Implementasi Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Kepastian Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia." *Jurnal Terakreditasi Nasional*, Volume 27, no. 3, (2021): 125-135. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.509>
- Bayu Aji Permana, Abdul Halim, SH, M.Kn, Drs. Ali Uraidi, MH, "Kekuatan Hukum Pembuktian Sertifikat Elektronik Dalam Perkara Perdata Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Sertifikat Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah." *Jurnal Ilmiah AKSES*, Volume 2, no. 1, (2024): 61-75. DOI: <https://doi.org/10.36841/akses.v2i1.4453>.
- Gunanegara dan Sherly Meilintan Surya, *Kejahatan Pendaftaran Tanah Oleh (Oknum) Pejabat ATR/BPN Di Wilayah Polda Metro Jaya Ditinjau Dari Hukum Administrasi Pemerintahan dan Hukum Pidana*, (2022). DOI: <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.29712.07684/1>
- Hakim, A. R., and M. A. Idrus. "Prosedur Penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai Bukti Autentik Penguasaan Hak Atas Tanah." *Juridica*, Volume 3, no. 1, (2021): 4-28. DOI: <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i1.191>
- Kartono, Satriyo Ardi, and Bha'iq Roza Rakhmatullah. "Efektivitas Pendaftaran Tanah Sertipikat Elektronik Aset Pemerintah." *UMPurwokerto Law Review*, Volume 4, no. 2, (2023): 309–20. DOI: <https://doi.org/10.30595/umplr.v4i2>.
- Lubis, A. S. "Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah yang Tidak Memiliki Alas Hak." *Doktrina: Journal Law*, Volume 2, no. 1, (2019): 1-10. DOI: [10.31289/doktrina.v2i1.2252](https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2252)
- Mujiburohman, D. A. "Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)." *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, Volume 4, no. 1, (2018): 20-30. DOI: <https://dx.doi.org/10.31292/jb.v4i1.217>

- Negara, C. U. K. K., K. Kutery, and Negaraman. "Urgensi Sistem Pengamanan pada Sertifikat Tanah Digital." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 2, no. 9, (2021): 88-95. DOI: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i9.91>
- Nugroho, W. "Persoalan Hukum Penyelesaian Hak Atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 27, no. 3, (2020): 568–591. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss3.art7>
- Sabhranah, A. N., "Sertipikat Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Data Pribadi," E-ISSN: 2622-7045, P-ISSN: 2654-3605, 2023. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.573>
- Shella, S. A., and R. D. Ramasari. "Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Sertifikat Tanah Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2021." *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, (2022): 1-14. DOI: <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.38>
- Supriyadi, A. A., M. Iftar, and M. Supriyadi. "Tinjauan Yuridis Kebijakan Menteri ATR/Kepala BPN Dalam Meminimalisir Praktik Mafia Tanah." *Semarang Law Review (SLR)*, Volume 3, no. 2, (2022): 45-60. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/slr.v3i2.5402>
- Syahri, R. A. "Perlindungan Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume 2, No. 5, (2014): 22-28. <https://media.neliti.com/media/publications/146453-ID-perlindungan-hukum-kepemilikan-hak-atas.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) (*Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1945*)
- Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
- Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 251*)
- Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 245*)
- Peraturan Pemerintah Nomor. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)
- Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1997)
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 461*)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (*Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 953*)

Direktorat Jendral Penanganan Masalah Agraria, P. dan T. R., "Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah," 2018.

Website/Internet

Adi Fajar Nugraha, "BPN Kota Bogor Terbitkan 2.600 Sertifikat Elektronik," diakses dari <https://www.rri.co.id/daerah/791375/bpn-kota-bogor-terbitkan-2-600-sertifikat-elektronik>, tanggal 15 November 2024.

ATR/BPN Kepri, "Perbedaan Sertipikat Analog dan Sertipikat Elektronik," <https://kepri.atrbpn.go.id/info-grafis/detail/3316/perbedaan-sertipikat-analog-dan-sertipikat-elektronik>, diakses pada 22 November 2024.

Badan Pertanahan Nasional (BPN), "Website Resmi BPN," <https://www.atrbpn.go.id>, diakses pada 15 November 2024.

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), "Sertifikat Elektronik," <https://www.bssn.go.id/sertifikat-elektronik/>, diakses pada 15 November 2024.

DJKN Kemenkeu, "Sekilas Mengenal Aplikasi Sentuh Tanahku," <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-metro/baca-artikel/12931/Sekilas-Mengenal-Aplikasi-Sentuh-Tanahku.html>, diakses pada 15 November 2024.

Hukum Online, "Penyebab Munculnya Mafia Tanah," <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-fh-ugm-ungkap-7-penyebab-munculnya-mafia-tanah-lt618a4cfd8bcd/?page=2>, diakses pada 20 Agustus 2024.

Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, "Sertipikat Elektronik Menuju Pelayanan Pertanahan Modern Berstandar Dunia," <https://ppid.kamparkab.go.id/public/dokumen/2021/02/6d2a83cfe4f546e402919cd76077e589.pdf>, diakses pada 09 November 2024.

Rumondang Naibaho, "Menteri AHY Ungkap Capaian 100 Hari Kerja: Berantas Mafia Tanah Percepat PTSL," <https://news.detik.com/berita/d-7379618/menteri-ahy-ungkap-capaian-100-hari-kerja-berantas-mafia-tanah-percepat-pts>, diakses pada 12 Agustus 2024.

Seksi Info Publik (2019), "Sertifikat Elektronik, Cara Baru untuk Efisiensi dan Keamanan Pengurusan Dokumen," diakses dari <https://kominfo.slemankab.go.id/sertifikat-elektronik-cara-baru-untuk-efisiensi-dan-keamanan-pengurusan-dokumen/>, diakses pada 7 November 2024.

SNYT Law Office, "Sertifikat Elektronik sebagai Bukti Hak Atas Tanah," diakses dari <https://snytlawoffice.com/sertifikat-elektronik-sebagai-bukti-hak-atas-tanah/>, pada tanggal 9 November 2024.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Nurhadi, S.SiT, Kepala Evaluasi Berkas pada Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bogor, *Zoom Video Communications*, tanggal 14 November 2024

